EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis SAKTI Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dit Samapta Polda Sulut

Once Wenda[1], Jacqualine Greety Wenas[2], Fanesa Isalia Minanda Syaefudin[3]
[1,2,3]Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan, Politeknik Negeri Manado, Indonesia
E-mail: [1]oncewenda7@gmail.com, [2]sonetyjo@gmail.com, [3]fanesa.syaefudin@polimdo.ac.id

Article History:
Received: 09 Agustus 2026
Revised: 23 Oktober 2026
Accepted: 06 November 2026

Keywords: *Sistem Informasi Akuntansi; SAKTI; Laporan Keuangan Pemerintah; Rekonsiliasi; Studi Kasus Kualitatif*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam penyusunan laporan keuangan pada Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara (Dit Samapta Polda Sulut) periode Januari–Juli 2026, serta mengidentifikasi manfaat, kendala, dan kebutuhan perbaikannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan strategi studi kasus, mengandalkan dokumentasi sebagai sumber bukti utama dan wawancara semi-terstruktur terhadap tiga kelompok informan (pimpinan urusan keuangan, operator aplikasi, dan penyusun laporan) sebagai pelengkap. Analisis data dilakukan melalui inventarisasi dokumen, reduksi data, pengodean, penyajian data, perbandingan antarsumber, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA berbasis SAKTI telah berjalan melalui tahapan dokumen sumber, pemeriksaan kelengkapan, persetujuan berjenjang, input oleh operator, validasi otomatis, otorisasi melalui One Time Password (OTP), koreksi atas penolakan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), rekonsiliasi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), penyusunan laporan, hingga penyimpanan data. Hasil rekonsiliasi SAKTI–SPAN sampai Juni 2026 menunjukkan selisih nol pada dua belas unsur yang direkonsiliasi. Namun demikian, ditemukan perbedaan angka realisasi antar-cetakan Laporan Realisasi Anggaran serta ketidakkonsistenan metadata periode pada dokumen Laporan Keuangan UAKPA Semester I. Manfaat yang teridentifikasi meliputi validasi otomatis, otorisasi berlapis, standardisasi format sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, dan penyimpanan data terpusat, sedangkan kendala utama berupa gangguan jaringan dan periode pemeliharaan aplikasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan jaringan, konsistensi*

metadata pelaporan, dan klarifikasi pembagian fungsi review sebagai langkah perbaikan lanjutan.

PENDAHULUAN

Digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia berkembang secara bertahap sejak reformasi keuangan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengamanatkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2003, 2004). Amanat tersebut membutuhkan dukungan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaporan (Mulyadi, 2016). Pada lingkup pemerintah pusat, penerapan SIA diwujudkan antara lain melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), aplikasi yang dikembangkan Kementerian Keuangan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan anggaran, pencatatan transaksi, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan satuan kerja Kementerian/Lembaga (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Laporan keuangan yang dihasilkan wajib disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Pemerintah Republik Indonesia, 2010).

Direktorat Samapta Polda Sulawesi Utara (Dit Samapta Polda Sulut), dengan kode satuan kerja 647114, merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pengelolaan anggarannya. Berdasarkan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-060.01.2.647114/2026 (Revisi ke-04 tanggal 11 Mei 2026), satuan kerja ini memperoleh pagu anggaran sebesar Rp32.364.007.000 yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni dan dicairkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado. Hasil Rekonsiliasi SAKTI–SPAN sampai dengan periode Juni 2026 menunjukkan bahwa seluruh unsur yang direkonsiliasi — pagu belanja, realisasi belanja, pendapatan bukan pajak, mutasi uang persediaan, dan kas di bendahara pengeluaran — memiliki nilai yang sama persis antara SPAN dan SAKTI.

Meskipun demikian, dokumen anggaran dan laporan keuangan yang tersedia memiliki tanggal cut-off dan tanggal cetak yang berbeda-beda. Dua cetakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk periode yang sama, yaitu sampai dengan 31 Juli 2026, menunjukkan angka realisasi belanja pemerintah pusat yang berbeda, dan seluruh dokumen keuangan yang digunakan masih dalam periode berjalan. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan audit atas angka laporan keuangan Dit Samapta Polda Sulut, melainkan untuk mendeskripsikan bagaimana SIA berbasis SAKTI digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan, mulai dari dokumen sumber hingga keluaran laporan.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan SIA pada sektor pemerintah sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh SIA terhadap kualitas laporan keuangan (Hayuningtyas dkk., 2025; Diah dkk., 2026; Obeng dkk., 2025). Penelitian ini mengambil posisi berbeda, yaitu pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif yang berfokus pada alur input–proses–output, penggunaan dokumen sumber, validasi, otorisasi, rekonsiliasi, penyusunan laporan, serta kendala teknis yang dihadapi, dengan objek Dit Samapta Polda Sulawesi Utara dan periode analisis Januari–Juli 2026. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan penerapan SIA berbasis SAKTI dalam proses penyusunan laporan keuangan pada Dit Samapta Polda Sulut, dan (2) mengidentifikasi manfaat, kendala, dan kebutuhan perbaikan dalam penerapannya.

LANDASAN TEORI

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah suatu susunan formulir, catatan, peralatan, tenaga pelaksana, serta laporan yang dikoordinasikan secara erat dan didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen (Mulyadi, 2016), sekaligus dipahami sebagai sistem pemrosesan transaksi yang mendukung perencanaan dan pengendalian organisasi (Kasmir, 2020). Komponen SIA yang relevan dengan penelitian ini meliputi manusia (operator, penyusun laporan, pimpinan urusan keuangan), prosedur, data, perangkat lunak (SAKTI dan GPP), infrastruktur teknologi, serta pengendalian internal berupa validasi, otorisasi, dan OTP (Nugroho dkk., 2025). Kerangka input–process–output–storage–control–feedback digunakan untuk memahami alur kerja SIA secara sistematis pada penelitian ini.

SAKTI adalah aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, untuk mendukung pengelolaan keuangan satuan kerja mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran dalam satu basis data tunggal (single database) (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). SAKTI beroperasi pada sisi satuan kerja, sedangkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) beroperasi pada sisi KPPN; kedua sistem tersebut direkonsiliasi secara berkala untuk memastikan kesesuaian data. Rekonsiliasi merupakan proses pencocokan data keuangan antara dua sumber pencatatan yang berbeda dengan tujuan memastikan kesesuaian nilai pada unsur-unsur pokok pengelolaan anggaran.

Laporan keuangan pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, dengan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas menggunakan basis akrual (Pemerintah Republik Indonesia, 2010). Penelitian terdahulu mengenai implementasi SAKTI dengan pendekatan kualitatif deskriptif telah dilakukan pada berbagai satuan kerja, antara lain Politeknik Imigrasi (Prabadhi dkk., 2026), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Perdana dkk., 2023), KPPN Semarang I (Rahman dkk., 2023), KPPN Palembang (Hasanah dkk., 2021), KPPN Pontianak (Anwar dkk., 2022), dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali (Nurdiani dkk., 2023), namun belum ada yang mengkaji satuan kerja operasional Polri di tingkat kewilayahan sebagaimana pada penelitian ini.

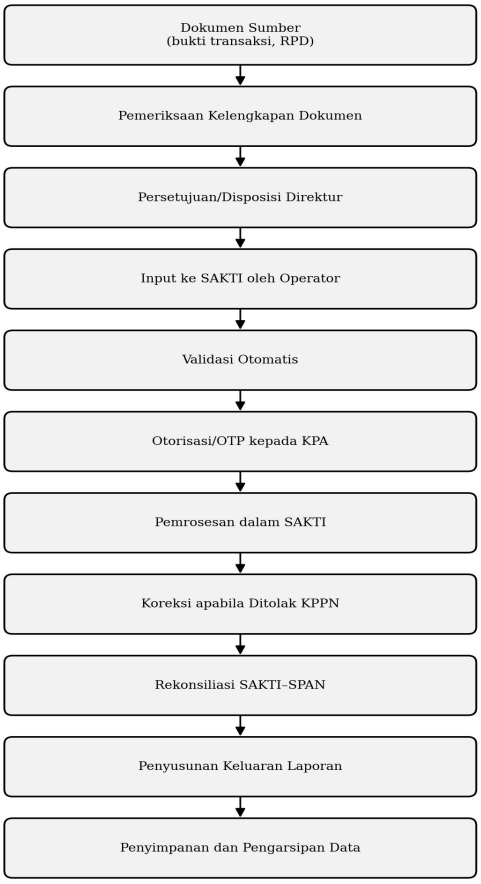
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan dominasi analisis dokumentasi, dilaksanakan pada Bidang/Urusan Keuangan Dit Samapta Polda Sulawesi Utara. Periode data yang dianalisis adalah Januari–Juli 2026, sedangkan pengumpulan dan analisis data dilaksanakan pada Agustus 2026. Fokus analisis meliputi dokumen sumber dan input, prosedur kerja, penggunaan aplikasi, validasi dan otorisasi, hak akses dan pemisahan fungsi, koreksi data, rekonsiliasi, penyusunan laporan, penyimpanan data, manfaat, kendala, dan kebutuhan perbaikan.

Data primer diperoleh dari wawancara semi-terstruktur terhadap tiga kelompok informan yang dipilih secara purposive, yaitu pimpinan/kepala urusan keuangan, operator aplikasi/staf keuangan, dan penyusun/verifikator laporan keuangan. Data sekunder meliputi sembilan jenis dokumen anggaran dan laporan keuangan, di antaranya DIPA Petikan dan DIPA/POK Tahun Anggaran 2026, Laporan Ketersediaan Dana Detail, Hasil Rekonsiliasi SAKTI–SPAN, Laporan Realisasi Anggaran, Paket Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas), Laporan Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan, serta Laporan Keuangan UAKPA Semester I 2026.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi,

meliputi inventarisasi dokumen, pengelompokan berdasarkan periode, identifikasi tanggal data dan tanggal cetak, serta pencatatan perbedaan data antardokumen. Analisis data menggunakan model analisis data kualitatif interaktif yang mencakup pengumpulan dan inventarisasi data, reduksi data, pemberian kode, penyajian data, perbandingan antarsumber, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber antara keterangan tiga kelompok informan dan dokumen pendukung. Gambar 1 menyajikan alur penerapan SIA berbasis SAKTI yang menjadi kerangka analisis penelitian ini.



Gambar 1. Alur Penerapan SIA Berbasis SAKTI pada Dit Samapta Polda Sulawesi Utara Sumber: Diolah dari keterangan informan dan dokumen Hasil Rekonsiliasi SAKTI–SPAN, 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Penerapan SIA Berbasis SAKTI

Berdasarkan keterangan informan, dokumen sumber utama berupa data Rencana Penarikan Dana (RPD) dibagikan ke masing-masing subsatker setiap bulan, dilanjutkan dengan konfirmasi dinas atas persetujuan direktur berupa disposisi sebelum staf keuangan memproses transaksi. Operator berperan menginput data transaksi ke SAKTI namun tidak memiliki hak akses untuk menyetujui transaksi, sejalan dengan komponen pengendalian internal berupa pemisahan fungsi. Validasi pada SAKTI menggunakan mekanisme One Time Password (OTP) yang dikirimkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai bentuk otorisasi agar tidak terjadi salah input. Apabila terjadi ketidaksesuaian, KPPN Manado menampilkan penolakan otomatis disertai uraian

kekurangan yang harus dilengkapi satuan kerja.

Rekonsiliasi SAKTI–SPAN

Hasil Rekonsiliasi SAKTI–SPAN pada Dit Samapta Polda Sulut sampai dengan periode Juni 2026, diterbitkan otomatis oleh sistem pada 21 Juli 2026, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Rekonsiliasi SAKTI–SPAN sampai dengan Juni 2026

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN (Rp)	Nilai SAKTI (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pagu Belanja	32.364.007.000	32.364.007.000	0
2	Belanja	11.038.902.275	11.038.902.275	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4.882.010	4.882.010	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	20.000.000	20.000.000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	20.000.000	20.000.000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Sumber: Hasil Rekonsiliasi SAKTI–SPAN KPPN Manado, terbit 21 Juli 2026.

Kedua belas unsur menunjukkan nilai SPAN dan SAKTI yang sama sehingga selisih tercatat nol pada seluruh unsur. Selisih nol tersebut hanya menunjukkan kesesuaian nilai pada unsur dan periode yang direkonsiliasi, dan tidak digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh laporan keuangan Dit Samapta Polda Sulut bebas dari salah saji, mengingat rekonsiliasi tidak mencakup seluruh pos laporan keuangan, misalnya pos Neraca non-kas seperti aset tetap dan penyusutan.

Keluaran Laporan dan Perbedaan Angka Antardokumen

Terdapat dua cetakan LRA untuk periode yang sama (s.d. 31 Juli 2026) dengan angka realisasi belanja pemerintah pusat yang berbeda: Rp12.413.248.780 (38%) pada cetakan bertanggal 16 Juli 2026, dan Rp12.525.416.780 (39%) pada cetakan bertanggal 4 Agustus 2026. Pada kedua cetakan, realisasi belanja pegawai tercatat sama, yaitu Rp10.960.040.663 (37%), sedangkan realisasi belanja barang berbeda: Rp1.453.208.117 (49%) pada cetakan pertama dan Rp1.565.376.117 (53%) pada cetakan kedua. Dokumen Laporan Keuangan UAKPA Semester I juga memuat ketidakkonsistenan metadata yang signifikan, dengan tabel Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca di dalamnya merujuk periode 31 Desember 2024/2025, bukan Semester I 2026, sehingga bagian kuantitatif dokumen tersebut tidak digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Neraca per 31 Juli 2026 pada Paket Laporan Keuangan mencatat Jumlah Aset Rp28.708.961.148 dan Jumlah Ekuitas Rp27.471.526.784, sedangkan Laporan Operasional mencatat Surplus/Defisit-LO minus Rp16.811.798.581, karakteristik umum satuan kerja pemerintah yang beban operasionalnya jauh lebih besar dari pendapatannya.

Manfaat, Kendala, dan Kebutuhan Perbaikan

Manfaat penerapan SIA berbasis SAKTI yang teridentifikasi meliputi validasi otomatis yang mencegah salah input, otorisasi berlapis melalui OTP, kemudahan koreksi melalui penolakan otomatis KPPN, standardisasi format laporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, penyimpanan data secara terpusat dan tercadangkan (cloud Kementerian Keuangan serta cadangan lokal), dan dukungan rekonsiliasi data antara satuan kerja dan KPPN. Di sisi lain, kendala yang ditemukan meliputi gangguan jaringan pada saat input data, periode pemeliharaan (maintenance) aplikasi, kelengkapan dokumen pada tahap verifikasi, serta perbedaan keterangan antarinforman mengenai ada-tidaknya kendala dan pihak yang melakukan review/pengesahan akhir laporan. Kebutuhan perbaikan yang dirumuskan meliputi penguatan kestabilan jaringan, penguatan mekanisme kerja pada saat sistem maintenance, konsistensi metadata dan periode pada dokumen yang diterbitkan (khususnya dokumen UAKPA Semester I), serta klarifikasi internal mengenai pembagian fungsi review dan pengesahan akhir laporan.

Pembahasan

Temuan mengenai penerapan SIA berbasis SAKTI pada Dit Samapta Polda Sulut menunjukkan alur input–proses–output–storage–control–feedback yang konsisten dengan kerangka SIA pada umumnya, dan sejalan dengan temuan Prabadhi dkk. (2026) bahwa SAKTI meningkatkan integrasi, standardisasi, dan ketertelusuran transaksi pada Politeknik Imigrasi, serta dengan Anwar dkk. (2022) yang menemukan keterkaitan operasional antara SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan pada KPPN Pontianak. Hasil rekonsiliasi selisih nol konsisten dengan pola umum penelitian terdahulu mengenai peran rekonsiliasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah berbasis SAKTI (Chairmanita, 2023), namun perbedaan angka realisasi antar-cetakan LRA dan ketidakkonsistenan metadata pada dokumen UAKPA menunjukkan bahwa keluaran sistem SAKTI pada praktiknya perlu dibaca bersama informasi tanggal data, tanggal cetak, dan status tutup periode, aspek yang belum banyak dibahas secara eksplisit pada penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada pengaruh SAKTI terhadap kualitas laporan secara agregat (Ramdany dkk., 2021; Anggraini dkk., 2024).

Manfaat validasi otomatis dan OTP yang ditemukan konsisten dengan temuan Gultom dkk. (2024) dan Haryani dkk. (2025) bahwa SAKTI mendukung akurasi dan kepatuhan pelaporan pada satuan kerja pemerintah. Kendala jaringan dan maintenance sejalan dengan temuan berulang pada penelitian implementasi SAKTI di berbagai satuan kerja, termasuk Nurdiani dkk. (2023) pada Dinas Pertanian Provinsi Bali dan Anwar dkk. (2022) pada KPPN Pontianak. Kebutuhan perbaikan yang dirumuskan pada penelitian ini — penguatan jaringan, konsistensi metadata pelaporan, dan klarifikasi pembagian fungsi review — sejalan dengan arah rekomendasi penelitian terdahulu mengenai penguatan infrastruktur teknis dan tata kelola SDM sebagai faktor pendukung keberhasilan implementasi SAKTI (Hasanah dkk., 2021; Susanti, 2025).

KESIMPULAN

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi berbasis SAKTI pada Dit Samapta Polda Sulawesi Utara telah berjalan melalui tahapan dokumen sumber, pemeriksaan kelengkapan, persetujuan/disposisi, input oleh operator, validasi otomatis, otorisasi melalui OTP, pemrosesan, koreksi atas penolakan KPPN, rekonsiliasi dengan SPAN, penyusunan keluaran laporan, serta penyimpanan dan pengarsipan data. Hasil rekonsiliasi SAKTI–SPAN sampai dengan Juni 2026 menunjukkan kesesuaian nilai (selisih nol) pada unsur dan periode yang direkonsiliasi, namun pada sisi keluaran laporan ditemukan perbedaan angka pada cetakan LRA dan ketidakkonsistenan metadata pada dokumen UAKPA Semester I yang belum dapat dijelaskan penyebabnya secara

pasti berdasarkan data yang tersedia. Penerapan SIA berbasis SAKTI mendukung proses penyusunan laporan keuangan melalui validasi otomatis, otorisasi berlapis, kemudahan koreksi, standardisasi format sesuai SAP, penyimpanan data terpusat, dan dukungan rekonsiliasi, meskipun masih ditemukan kendala berupa gangguan jaringan, periode maintenance aplikasi, dan kelengkapan dokumen pada tahap verifikasi.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Dit Samapta Polda Sulawesi Utara menyusun daftar periksa kelengkapan dokumen sebelum input data, meninjau kembali konsistensi metadata dan periode pada dokumen yang diterbitkan (khususnya dokumen UAKPA Semester I), serta menetapkan prosedur kerja tertulis pada saat aplikasi SAKTI mengalami maintenance. Bagi pengelola atau operator SAKTI, disarankan memperkuat pencadangan data secara berkala dan melakukan koordinasi rutin untuk memperjelas pembagian fungsi review dan pengesahan akhir laporan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data satu tahun anggaran penuh, menambah jumlah dan keragaman informan, serta menggunakan laporan keuangan yang telah tutup periode (final) untuk memungkinkan analisis angka yang lebih pasti. Penelitian ini tidak menyarankan penggantian aplikasi SAKTI atau perubahan kebijakan pengelolaan keuangan negara secara nasional, karena hal tersebut berada di luar kewenangan dan bukti yang dimiliki objek penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

Anggraini, A., dkk. (2024). The influence of accounting information systems, internal control systems and human resource competencies on the quality of financial reports with regional government leadership style as a moderation variable. The Contrarian: Finance, Accounting, and Business Research.

Anwar, A., dkk. (2022). Implementasi Aplikasi Sakti dan Span dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Jurnal Informatika.

Chairmanita, D. (2023). Penyempurnaan Proses Rekonsiliasi melalui SAKTI: Penerapan Metode Business Process Improvement pada Akuntansi Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Jurnal Disprotek.

Diah, A. M., dkk. (2026). Information technology capability and financial reporting quality in local governments: the mediating role of accounting information system quality. Cogent Business & Management.

Gultom, C. M., dkk. (2024). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pemerintah. Owner.

Haryani, P., dkk. (2025). The Financial Reporting in the Public Sector: Implementing the SAKTI System at Indonesia's Ministry of Finance. Jurnal Bisnisman: Riset Bisnis dan Manajemen.

Hasanah, N., dkk. (2021). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di Masa Pandemi Covid-19 pada KPPN Palembang. Journal Publicuho.

Hayuningtyas, W. R., dkk. (2025). Financial Report Quality through Accounting Information System Implementation. Indonesian Journal of Law and Economics Review.

Kasmir. (2020). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Nugroho, A. Y., dkk. (2025). Akuntansi Sebagai Sistem Informasi Keuangan. MMFAST Publishing.

Nurdiani, N., dkk. (2023). Implementation of Financial Application System Policies at the Services of Agriculture and Food Security of Bali Province. International Journal of Business Management and Economic Review.

Obeng, E., dkk. (2025). The Impact of Accounting Information System Quality on Financial Reporting in Local Government Units in the Ashanti Region of Ghana. Journal of Applied Science, Arts and Business.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perdana, F., dkk. (2023). Analysis of the Implementation of the Accounting Application System for Line Ministry (SAKTI) in Government Financial Reporting at the Directorate General of State Asset Management. Journal of Social Transformation and Regional Development.

Prabadhi, I. A., dkk. (2026). SAKTI Implementation and the Reform of Public Financial Management Through E-Government. International Journal of Qualitative Research.

Rahman, S., dkk. (2023). Analisis Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I. Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis.

Ramdany, R., dkk. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Susanti, C. (2025). Implementation of the Sakti Application for Financial Management in Higher Education Institutions. Jurnal Akuntansi Publik Nusantara.